

## Pemprov Lampung Imbau Warga Waspada Erupsi GAK

**BANDARLAMPUNG (IM)**- Pemerintah Provinsi (Pemrov) Lampung mengimbau masyarakat yang ada di daerahnya untuk tenang dan tetap waspada terhadap erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) yang terjadi di awal 2023. "Seperti yang kita ketahui Gunung Anak Krakatau memang tengah mengalami erupsi dalam beberapa waktu ini," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, di Bandar Lampung, Rabu (11/1).

La mengatakan dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau yang cukup intens tersebut masyarakat diimbau untuk tetap waspada. "Pertama masyarakat harus tenang dan jangan panik kalau ada peningkatan aktivitas gunung berapi," katanya.

Dia menjelaskan adanya peningkatan aktivitas gunung berapi yang terletak di Selat Sunda itu menjadi atensi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi atas dampak yang ditimbulkan. "Gunung Anak Krakatau ini merupakan gunung aktif, sehingga saat terjadi erupsi itu jadi salah satu cara untuk mengurangi besarnya erupsi kedepannya dan meredam dampak bagi lingkungan sekitar," ucapnya.

Ia mengharapkan adanya erupsi tersebut tidak mengakibatkan dampak yang luas bagi masyarakat sekitar. "Harapannya tidak menimbulkan bencana yang berdampak luas bagi masyarakat, dan semua tetap tenang tapi waspada," tambahnya.

Diketahui sebelumnya Gunung Anak Krakatau mengalami peningkatan aktivitas pada awal 2023 di mana Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekam aktivitas erupsi berupa lontaran abu setinggi lebih kurang 100 meter yang dikeluarkan oleh Gunung Anak Krakatau di Lampung pada Rabu (4/1).

Lalu pada Kamis (5/1) kembali mengalami erupsi dengan melontarkan abu setinggi 750 meter di atas puncak gunung. Dan untuk situasi ke depannya Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda antara Banten dan Lampung terjadi sebanyak tiga kali dengan amplitudo 20 milimeter serta durasi selama tujuh detik pada Sabtu (7/1), dan kondisi status Gunung Anak Krakatau tersebut dengan ketinggian 157 meter di atas permukaan laut (mdpl) itu masih siaga Level III. ● **pra**



**PENAMPILAN SENI PENYANDANG DISABILITAS**

Penyandang disabilitas saat memainkan angklung di Balai Besar Vokasional Inten Soeweno, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/1). Penyandang disabilitas di tempat tersebut selain dibekali dengan keterampilan kerajinan juga dilatih berbagai jenis kesenian seperti menari dan bermain musik.

## Pemkab Tangerang Ajukan Bantuan bagi Para Petani Terdampak Banjir

Hingga saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang masih melakukan pencatatan terhadap jumlah luasan lahan sawah yang terdampak banjir tersebut. Untuk yang terdata ada 24 hektare. Tapi kemungkinan masih ada beberapa wilayah di kecamatan yang terkena banjir, ujar Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika.

**TANGERANG (IM)**- Pemkab Tangerang mengajukan bantuan ke Pemprov Banten untuk para petani yang lahan sawahnya terdampak banjir akibat cuaca ekstrem. "Untuk bantuan kita akan mencoba mengusulkan ke Provinsi Banten berupa

benih padi sebagai pengganti rugi," kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika, Rabu (11/1).

Dia mengatakan, saat ini sedang dilakukan pendataan para petani di Kabupaten

Tangerang yang lahan sawahnya terdampak banjir, sehingga dapat diketahui berapa banyak yang akan diberi bantuan benih dalam membantu petani meredakan kerugiannya. "Petugas kami baik penyuluh pertanian dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan masih melakukan pendataan dan pemantauan kondisi terkini," ujarnya.

Dia mengungkapkan, hingga saat ini Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang masih melakukan pencatatan terhadap jumlah luasan lahan sawah yang terdampak banjir tersebut.

"Untuk yang terdata ada 24 hektare. Tapi kemungkinan masih ada beberapa wilayah di kecamatan yang terkena banjir," ujarnya.

Sementara itu, lanjut dia, nilai total kerugian yang dialami para petani dari dampak banjir itu belum bisa dipastikan berapa jumlah nilai totalnya. "Kalau nilai kerugian belum dapat dianalisa secara keseluruhan. Karena ada terkait perhitungan secara teknis berdasarkan MT," ungkapnya.

Hingga saat ini pemerintah setempat mencatat seluas 24 hektare area sawah di wilayahnya itu terdampak banjir akibat tingginya curah hujan yang disusul meluapnya sungai. Sawah yang terdampak itu tersebar di dua kecamatan dengan sempit desa.

Adapun dari 24 hektare luasan lahan sawah yang terdampak atau terdampak banjir yaitu seperti di kecamatan Kresek, Desa Koper dengan

luas lima hektare dan Desa Pasir Ampo seluas 8 hektare. "Sedangkan di Kecamatan Jayanti yaitu di Desa Cikande seluas lima hektare dan di Desa Pasir Gintung nya ada tujuh hektare lahan sawah terdampak banjir," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dari hasil pencatatan petugas penyuluh di lapangan bahwa usia tanam padi yang terdampak banjir itu di kisaran umur 7 sampai 20 HST. Sedangkan untuk masa tanam padi yang berada di wilayah Jayanti 25 sampai dengan 35 HST.

"Data sementara hasil monitoring petugas kami di lapangan jumlah persawahan yang terdampak banjir ada 24 Ha di wilayah Kresek dan Jayanti, laporan yang kami terima kemarin tanggal 3 Januari 2023," pungkasnya. ● **pp**

## Nelayan Tradisional Kabupaten Lebak Kembali Melaut

**LEBAK (IM)**- Nelayan tradisional di pesisir Kabupaten Lebak, kembali melaut. Hal itu dilakukan sejak tiga hari terakhir menyusul cuaca dan gelombang di perairan selatan Banten relatif normal dibandingkan sebelumnya yang mencapai empat meter. "Kami berharap tangkapan nelayan melimpah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi nelayan," kata Ketua Koperasi Nelayan Bina Muara Sejahtera Binuangeun, Wading di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Rabu (11/1).

Berharap dengan meningkatnya tangkapan itu dapat menyisakan uang untuk menyimpan di koperasi," kata Wading.

Ujang, seorang nelayan TPI Bayah, Kabupaten Lebak mengaku, ia bersama nelayan lain sudah kembali melaut setelah satu bulan lebih menganggur akibat cuaca buruk. Mereka nelayan sudah empat hari terakhir melaut dan lumayan menghasilkan tangkapan hingga mencapai 300 kg. Jika diakumulasikan menjadi uang sekitar Rp 1,2 juta. "Saya mendapat Rp 1,2 juta dan setelah dipotong biaya bahan bakar, makan, rokok, dan setoran ke juragan pemilik perahu bisa bawah uang bersih ke rumah Rp 200 ribu," kata Ujang.

Begitu pula nelayan TPI Binuangeun, Acuy (50), mengatakan sudah beberapa hari melaut dengan menggunakan perahu kincang serta dilengkapi alat tangkap rawe atau pancing. Nelayan merasa lega setelah cuaca normal bisa kembali melaut.

Selama ini, kegiatan nelayan di 11 tempat peladangan ikan (TPI) Kabupaten Lebak kembali menggeliat setelah beberapa pekan menganggur akibat gelombang tinggi disertai angin kencang melanda selatan Banten atau Samudra Hindia. Mereka melaut mulai dini hari dan kembali ke TPI sekitar pukul 14.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB.

Saat ini, kata Wading, transaksi peladangan di TPI Tanjung Panto ramai dan kebanyakan tangkapan ikan cakalang dan kembung bisa mencapai Rp 30 ribu-Rp 40 ribu per kilogram (kg). Jenis ikan itu dipasok ke luar daerah menyusul tingginya permintaan pedagang. "Kami

berharap dengan meningkatnya tangkapan itu dapat menyisakan uang untuk menyimpan di koperasi," kata Wading.

Ujang, seorang nelayan TPI Bayah, Kabupaten Lebak mengaku, ia bersama nelayan lain sudah kembali melaut setelah satu bulan lebih menganggur akibat cuaca buruk. Mereka nelayan sudah empat hari terakhir melaut dan lumayan menghasilkan tangkapan hingga mencapai 300 kg. Jika diakumulasikan menjadi uang sekitar Rp 1,2 juta. "Saya mendapat Rp 1,2 juta dan setelah dipotong biaya bahan bakar, makan, rokok, dan setoran ke juragan pemilik perahu bisa bawah uang bersih ke rumah Rp 200 ribu," kata Ujang.

Begitu pula nelayan TPI Binuangeun, Acuy (50), mengatakan sudah beberapa hari melaut dengan menggunakan perahu kincang serta dilengkapi alat tangkap rawe atau pancing. Nelayan merasa lega setelah cuaca normal bisa kembali melaut.

Bahkan, Acuy pada Rabu pagi WIB, berhasil membawa uang Rp 300 ribu bersih setelah dipotong retribusi dan bahan bakar minyak, usai melaut. Beruntung, tangkapan ikan saat ini melimpah, karena dipastikan sudah tiba musim selatan. ● **pra**



**PROGRAM SWASEMBADA BAWANG MERAH**

Sejumlah petani binaan Kementerian Pertanian memanen bawang merah di Desa Toyomerto, Serang, Banten, Rabu (11/1).

## Diduga BPK Temukan Kesalahan Penganggaran BPKAD Kab.Tangerang Tahun 2019

**TANGERANG (IM)**- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kesalahan penganggaran telah menjadi temuan pemeriksaan dalam LHP BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Tangerang TA 2018 Nomor 21a/LHP/XVIII.SRG/05/2019 tanggal 17 Mei 2019.

Dikutip dari Resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tangerang agar Kepala Dinas terkait berkoordinasi dengan BPPT untuk menyempurnakan aplikasi SIMRAL terkait menu dan pengoperasian rekening (akun) belanja barang jasa maupun belanja modal serta mengevaluasi sistem penganggaran dan menyusun SOP tentang pengajuan anggaran.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bupati Tangerang telah menyampaikan surat kepada Kepala BPKAD nomor 700/2255-Um/2019 tanggal 18 Juni 2019 yang menginstruksikan agar menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait penyempurnaan aplikasi SIMRAL dan penyusunan SOP tentang pengajuan anggaran.

"Status tindak lanjut rekomendasi tersebut sampai dengan Semester II Tahun 2021 masih dalam proses karena belum ada pemutakhiran dan SOP masih berbentuk konsep," tulis laporan LHP BPK pemerintah kabupaten Tangerang tahun 2021.

Dalam petikan tersebut, Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 menunjukkan masih terdapat kesalahan penganggaran dan

realisasi belanja Tahun 2021. Kesalahan penangan tersebut di antaranya Pengadaan Aset Tetap yang Dianggarkan pada Akun Belanja Barang dan Jasa di 56 Perangkat Daerah.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat kesalahan penganggaran senilai Rp83.809.474.553,00 terdiri dari pengadaan Peralatan dan Mesin yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.593.838.389,00.

Selain itu, Gedung dan Bangunan yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa senilai Rp44.412.431.324,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa senilai Rp30.776.264.868,00.

Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa senilai Rp158.964.500,00; dan Konstruksi dalam Pengerjaan yang dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa senilai Rp6.867.975.472,00.

Atas pengandaan tersebut telah dicatat sebagai Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2021.

Berdasarkan kondisi di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 terdapat kesalahan penganggaran belanja senilai Rp133.992.682.701,00.

Hasil Wawancara Badan Pemeriksa keuangan dengan Kepala Bidang Anggaran dan Staf pada BPKAD selaku anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengakui bahwa masih banyak terjadi kesalahan penganggaran pada Tahun 2021.

TAPD sudah memberikan arahan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk menganggarkan sesuai kode

rekeningnya. Setelah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), verifikasi tidak dapat dilakukan lebih detail oleh TAPD sebelum pengesahan karena tidak terdapat fungsi verifikasi dalam aplikasi SIPD dan keterbatasan pemahaman TAPD menggunakan aplikasi SIPD karena belum pernah mendapatkan pelatihan, sehingga masih terdapat penganggaran yang tidak tepat.

BPK Menilai Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan, Peraturan Bupati Tangerang Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut mengakibatkan, Realisasi belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja tidak terduga tidak sesuai dengan klasifikasi belanja sebesar Rp133.992.682.701,00; dan Fungsi anggaran sebagai alat pengendalian alokasi pengeluaran keuangan daerah tidak berjalan dengan optimal.

Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Tangerang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.

BPK merekomendasikan Bupati Tangerang memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD agar menginstruksikan para Kepala Perangkat Daerah lebih cermat dalam menyusun RKA/DPA, melaksanakan pelatihan terkait pengoperasian aplikasi SIPD kepada TAPD supaya proses verifikasi atas pengajuan anggaran berjalan optimal. ● **joh**



**PETERNAK KUCING BENGAL DI MALANG**

Peternak mengajak bermain kucing ras bengal atau jenis kucing persilangan (Prionailurus Bengalensis x Felis Domestica) peliharaannya di Umoni Cat Breeder, Malang, Jawa Timur, Rabu (11/1). Peternak kucing bengal tersebut mengatakan setiap enam bulan sekali dirinya mampu menjual sekitar 10 ekor anakan dengan harga Rp2,5 juta hingga Rp25 juta per ekor melalui pasar digital.

## Produsen Sepatu Tawarkan 1.600 Karyawan Resign, Ini Kata Pj Gubernur Banten

**SERANG (IM)**- Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku sudah komunikasi dengan pihak PT Nikomas Gemilang mengenai tawaran resign sukarela ke 1.600 karyawan. Ia menilai tawaran dari produsen sepatu merek dunia itu baik dan humanis. "Saya juga sudah komunikasi dengan berbagai lembaga baik itu tawaran dan humanis," kata Muktabar ke wartawan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Serang, Rabu (11/1).

Tawaran itu katanya karena PT Nikomas terkena imbas pada kondisi ekonomi global. Ia rasa itu tidak hanya terjadi di Banten tapi juga secara umum di daerah lain. "Itu secara global bukan saja di Banten tapi global," tegasnya.

Tentunya, lanjut Muktabar, bertambahnya tenaga kerja yang menganggur berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Tapi, tetap ada peluang bagi mereka mendapat kembali pekerjaan. Khususnya terkait menin-

gkatkan investasi sebesar 105 persen di tahun lalu yang bisa berdampak pada bursa kerja Banten. "Kita tahu investasi meningkat, itu juga berarti ada harapan kesempatan ruang kerja, mudah-mudahan keadaan global membaik, nasional tentunya sangat baik," paparnya.

Informasi mengenai tawaran resign ke salah satu pabrik itu ia harap juga menjadi perhatian stakeholder di Banten. Termasuk kabupaten kota agar ada perhatian untuk para pencari kerja ke depannya. "Kita harap Banten secara umum bisa stabil dalam segala aspek kehidupan kita," pungkasnya.

PT Nikomas Gemilang sebagai produsen sepatu merek dunia menawarkan ke 1.600 karyawan untuk resign sukarela. Tawaran ini dilakukan karena perusahaan yang terdampak ekonomi global yang menyebabkan turunnya ekspor ke berbagai negara. Karyawan yang ikut program ini akan dibayarkan haknya berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Sama. ● **pp**